

### BAB 3 SEKOLAH INKLUSI

Bab ini berisi deskripsi tentang persepsi definisi sekolah inklusi, awal mula menjadi sekolah inklusi, bagaimana pelaksanaan pendidikan inklusi di SDN Lebak Bulus 06, Kesulitan ABK mencari sekolah, tanggapan siswa yang lain terhadap ABK dan tanggapan orang tua siswa yang lain terhadap ABK.

#### 3.1. Persepsi tentang Definisi Sekolah Inklusi

Sekolah inklusi bagi guru-guru di SD Lebak Bulus 06 adalah *“Sekolah umum atau sekolah reguler yang menerima anak-anak berkelainan untuk sekolah bersama-sama dengan anak-anak yang normal”*. Menurut salah satu orang tua siswa *“Sekolah ini disebut sekolah inklusi karena tiap tahun dapat menerima anak-anak autis walaupun terbatas jumlahnya”*. Sedangkan kepala sekolah memahami sekolah inklusi sebagai tempat transit bagi anak-anak berkelainan dari sekolah khusus atau SLB ke masyarakat sebagaimana penuturannya berikut ini; *“ABK (Anak Berkebutuhan Khusus) dapat diterima di sekolah reguler karena alasan persamaan hak, menurut saya SD inklusi merupakan tempat transit dari SLB sebelum ke masyarakat”*. Persepsi kepala sekolah tentang SD inklusi sebagai tempat transit dapat difahami karena anak-anak ABK yang mendaftar di sekolah Lebak Bulus 06 adalah ABK yang telah mendapat pendidikan dan terapi dari sekolah-sekolah khusus untuk ABK seperti Purba Adhika dan Dwigantari.

Menurut Buku Pedoman dari Direktorat Pembinaan SLB (2007) Pendidikan inklusif adalah sistem layanan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua anak belajar bersama-sama di sekolah umum dengan memperhatikan keragaman dan kebutuhan individual, sehingga potensi anak dapat berkembang secara optimal. Semangat pendidikan inklusif adalah memberi akses yang seluas-luasnya kepada semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus, untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya.

Bila dilihat dari penjelasan buku pedoman di atas dapat dipahami bahwa sekolah inklusi sebenarnya bukan hanya ABK saja yang dapat diterima di sekolah reguler tapi semua anak termasuk anak-anak yang terpinggirkan, anak-anak minoritas dan anak-anak yang memiliki permasalahan sosial budaya lainnya.

Sekolah inklusi dalam pemahaman orang tua siswa, guru dan kepala sekolah telah mengalami penyempitan makna.

### 3.2. Awal Mula Menjadi Sekolah Inklusi

SDN Lebak Bulus 06 mulai menjadi sekolah inklusi sejak tahun ajaran 2004/2005 hal ini dikemukakan oleh Ibu Suminah sebagai berikut;

*”Sejak tahun ajaran 2004/2005 sekolah ini ditunjuk oleh Pak Yatno sebagai sekolah inklusi. Pak Yatno itu adalah Kasi pendidikan kecamatan Cilandak pada waktu itu. Saya juga tidak tahu mengapa sekolah ini ditunjuk, mungkin karena sekolah ini berdampingan dengan ULAKA di sana kan pusat pelatihan anak-anak cacat. Saya waktu itu bertanya pada Pak Yatno bagaimana menyelenggarakan inklusi karena kami belum tahu caranya. Pada waktu itu Pak Yatno bilang bahwa ia juga belum tahu caranya tapi Dinas sudah menunjuk 06 yang akan dijadikan sekolah inklusi ya dijalani saja”.*

Tentang mulanya menjadi sekolah inklusi kepala sekolah menuturkan sebagai berikut, *“Awal adanya inklusi itu yang saya tidak tahu. Katanya dulu Pak kasi pendidikan tingkat kecamatan diminta mencari 3 SD untuk dijadikan pilot project inklusi dan dikasih dana untuk inklusi sebesar 5 juta per sekolah, tapi setelah itu tidak ada tindak lanjutnya.*

Dari penuturan di atas dapat dipahami bahwa penunjukan menjadi sekolah inklusi merupakan kebijakan yang bersifat *top down* . Hal ini menunjukkan kekuasaan dan hegemoni yang kuat dari posisi yang di atas. Pihak sekolah tidak dapat menolak karena penunjukan dipandang sebagai perintah atasan yang harus diikuti. Hal ini adalah masalah relasi kuasa antara atasan dan bawahan. Tiga kata terakhir (*ya dijalani saja*) pada penuturan guru di atas menunjukkan kepasrahan yang dilakukan tanpa adanya koersi. Padahal yang menunjuk dengan yang ditunjuk sebenarnya belum memahami apa dan bagaimana menyelenggarakan pendidikan inklusi. Kebijakan dilakukan tanpa adanya persiapan sumberdaya dan sarana yang memadai.

Dari penuturan kepala sekolah kita juga mendapatkan gambaran bagaimana sebuah program dijalankan hanya sebatas menunaikan program tanpa ada perencanaan yang matang dan pembinaan program yang berkelanjutan. Program dilakukan hanya sebatas hangat-hangat tahi ayam. Dana program habis,

habis pula lah kegiatan tersebut. Hal ini sering terjadi dalam kebijakan-kebijakan yang dimunculkan dalam dunia pendidikan kita.

Gambaran kondisi sumber daya dan sarana di Lebak Bulus 06 yang belum siap pada waktu itu untuk menyelenggarakan sekolah inklusi menyebabkan saya mengajukan pertanyaan mengapa sekolah ini yang ditunjuk menjadi sekolah inklusi. Ibu Suminah yang dipandang sebagai guru yang paling memahami sejarah pendidikan inklusi di SDN Lebak Bulus 06 menuturkan;

*“Katanya dulu orang tuanya Fajar (Fajar sekarang siswa kelas 5) mendaftar di Lebak Bulus 04 dan 05 tapi ditolak kemudian ia mengadu ke Dinas didampingi orang dari tempat terapinya Fajar maka kemudian sekolah ini ditunjuk sebagai sekolah inklusi dan Fajar dapat diterima di sekolah ini”.*



Gambar 3.1 Fajar dengan ayahnya

### 3.3. Pelaksanaan Pendidikan Inklusi di Lebak Bulus 06

Pelaksanaan pendidikan inklusi di SD Lebak Bulus 06 penyelenggaraannya berdasarkan kebijakan yang diambil secara mandiri oleh pihak sekolah. Hal ini dikemukakan oleh kepala sekolah sebagai berikut *“Saat ini pemerintah hanya bisa menunjuk ini sekolah inklusi tapi tidak dibarengi dengan ini tenaga pengajarnya, ini kurikulumnya, ini medianya, ini petunjuknya, ini sarananya”*. Dalam keterbatasan tersebut ditambah lagi dengan tidak ada bimbingan yang kontinyu dari pihak-pihak yang berwenang. Kepala sekolah mengatakan;

*“Banyak hal yang diperlukan dalam melangsungkan inklusi ini, guru-guru harus memahami SD inklusi itu apa, pengetahuan jenis ABK yang ada dan untuk Kepsek mengenai manajemen inklusi itu bagaimana, harusnya ada pengetahuan tentang itu. Saya baru 8*

*bulan disini hanya meneruskan program yang telah ada, saya tidak mengerti banyak, hanya dua kali penataran tentang inklusi, jadi masih meraba-raba, mencari ilmunya sambil berjalan. Pengawas sekolah juga nampaknya kurang paham masalah inklusi. Sebenarnya perlu penataran satu paket; guru, kepala sekolah, pengawas, dan kasi penataran bersama-sama”.*

Dalam keterbatasan yang ada, saya melihat kegigihan dan semangat yang tinggi dari kepala sekolah dan GPK serta guru-guru yang ada di SD Lebak Bulus 06, sehingga dalam kondisi yang demikian mereka masih dapat menerima ABK untuk bersekolah di SD Lebak Bulus 06 sehingga masyarakat mengenalnya sebagai sekolah inklusi.

### **3.3.1. Tanpa Ada SK dan Juknis**

Tidak semua sekolah dasar reguler mau menerima anak-anak berkebutuhan khusus. Sekolah Dasar Lebak Bulus 06 ini tiap tahun menerima pendaftaran Anak Berkebutuhan Khusus jenis autisme karena telah ditunjuk menjadi sekolah inklusi. Namun ketika saya menanyakan tentang Surat Keputusan penunjukkan tersebut dan petunjuk teknis pelaksanaannya baik kepala sekolah maupun guru yang ada di sekolah tersebut tidak dapat menunjukkannya. Mereka berjanji akan mencarinya dahulu dan akan ditunjukkan pada saya saat saya datang lagi ke sekolah tersebut. Ketika saya kembali ke sekolah tersebut tiga hari kemudian, Ibu Suminah mengatakan;

*”Begini Bu Heni saya kemarin sudah ke SD Pondok Labu 01, Pak Yayat (kepala sekolah di Lebak Bulus 06 pada tahun ajaran 2005/2006) kan sekarang kepala sekolah di sana. Barangkali Pak Yayat menyimpan SK dan Juknis tersebut karena saya cari di sini tidak ada. Ternyata kata Pak Yayat kita memang tidak diberi SK untuk menjadi sekolah inklusi hanya ditunjuk begitu saja, tapi pada waktu itu kita tidak dapat mengelak karena Kasi yang menunjuk dan tentang buku pedoman pelaksanaan untuk penyelenggaraan inklusi juga kita tidak diberi”.*

Penunjukkan sekolah inklusi tanpa adanya SK dan juknis dapat diterima oleh pihak sekolah, menunjukkan tingkat kesukarelaan yang tinggi dari pihak sekolah dan hegemoni kekuasaan yang besar dari atasan. Hal ini menandakan adanya relasi kuasa antara pihak sekolah dan atasannya, dalam hal ini Kasi Pendidikan tingkat kecamatan. Sesuatu

kebijakan atau perintah yang datang dari kuasa atas, selalu diterima tanpa dipertanyakan lagi.

### 3.3.2. Pelatihan yang Terlambat

Pada umumnya bila akan melaksanakan program kegiatan atau kebijakan tertentu maka dilakukan pembekalan atau pelatihan terlebih dahulu. Sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penyelenggaraannya disiapkan sebelumnya. Namun dalam penyelenggaran pendidikan inklusi di SD Lebak Bulus 06 tidak demikian. Berikut penuturan Ibu Suminah;

*“Setelah menjadi SD Inklusi, kami jadi harus belajar banyak bagaimana menangani anak yang autis. Baru pada tahun 2006 kalau ga salah semua guru di sini dapat pelatihan tentang pendidikan inklusi. Kapan ya Bu Min kita dapat pelatihan itu?”*

Ibu Suminah bertanya pada Ibu Min. Bu Min kemudian mengeluarkan sebuah sertifikat dan membacakan tanggal yang tertera *” Tanggal 9 sampai 11 Oktober 2006”*. Saya kemudian meminjam sertifikat itu pada Bu Min. Dalam sertifikat itu tertera Yayasan Helen Keller sebagai penyelenggara bekerja sama dengan Dinas Pendidikan. Materi yang diberikan dalam pelatihan itu tertera sebagai berikut: 1). Konsep Dasar Pendidikan Inklusi, 2) Peran Stakeholder dalam Pendidikan Inklusi, 3) Identifikasi dan Assesment Anak berkebutuhan Khusus. 4). Program Pembelajaran Individual. 5). Manajemen Kelas dan 6) Kerjasama antara Orang Tua, Guru dan Masyarakat

Guru baru mendapatkan pelatihan tentang pendidikan inklusi setelah sekolah menyelenggarakan pendidikan inklusi selama satu tahun. Seharusnya SDM disiapkan dulu baru diselenggarakan. Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 41 ayat (1) menyatakan *”Setiap satuan pendidikan yang melaksanakan pendidikan inklusif harus memiliki tenaga kependidikan yang mempunyai kompetensi menyelenggarakan pembelajaran bagi peserta didik dengan kebutuhan khusus”*. Hal ini menunjukkan peraturan yang ada tidak sesuai dengan praktek yang ada di lapangan karena adanya kekuasaan tertentu yang membuat pihak sekolah menjadi kesulitan baik dalam sumber daya manusia maupun sumber pendanaannya, berikut penuturan kepala sekola;

*“Guru-guru di sini setelah ditunjuk menjadi inklusi pada waktu itu katanya setahun kemudian ada pelatihan 3 hari diselenggarakan di SLB A. Setelah itu Pak Karim pernah ikut sekali pelatihan, Bu Sum juga pernah beberapa kali. Seminar yang berkaitan dengan inklusi*

*sepanjang bisa ya diikuti . Selama ini dirasa cukuplah tapi ya harus dibina terus harusnya. Inklusi ini seperti program setengah hati, dana untuk membayar GPK (Guru Pembimbing Khusus untuk ABK) tidak diberikan oleh pemerintah.*

Ketiadaan dana untuk GPK (Guru Pendamping Khusus) membuat pihak sekolah berpikir untuk menyasati bagaimana GPK tetap ada agar kelangsungan penyelenggaraan sekolah inklusi bisa berlangsung terus.

### **3.3.3. Menyasati Tenaga Guru Pendamping**

Saat penelitian berlangsung di SD Lebak Bulus 06 hanya ada satu GPK untuk menangani 6 ABK. Sebenarnya pada awal penunjukkan menjadi sekolah inklusi ada lima GPK untuk satu orang ABK, berikut penuturan Ibu Suminah;

*”Selama satu semester pertama dari tempat terapi Fajar dari Dwigantari ada 5 orang guru pendamping yang dampingi setiap hari secara bergantian dan setiap bulan ada pertemuan antara guru pendamping, kepala sekolah, wali murid dan guru kelas. Setelah satu semester guru pendamping dari Dwigantari hanya mendampingi tiga hari dalam satu minggu setelah satu tahun mereka tidak lagi dampingi. Jadi guru-guru disini yang dampingi secara bergilir, siapa yang punya jam kosong ia dampingi ABK dan tiap tahun kita tetap menerima satu ABK. Begitu guru kita bergilir selama satu setengah tahun sampai kita bermusyawarah bahwa kita harus mengambil guru pendamping yang mengerti masalah autis dan sudah berpengalaman, jadilah kita mencari guru pendamping ABK. Sebenarnya ada dua calon. Yang satu lulusan baru dari psikologi UI yang satu dari jurusan PLB UNJ dan sudah berpengalaman mengajar di Purba Adika, sekolah khusus untuk anak-anak autis. Kami sepakat dengan kepala sekolah untuk mengambil yang sudah berpengalaman agar dapat melakukan tugas dengan lebih baik”.*

Ketika saya menanyakan mengapa pendamping dari Dwigantari tidak bekerja lagi di SD Lebak Bulus 06. Salah satu guru menuturkan;

*“Dulu memang ada lima orang GPK dari tempat terapinya Fajar di sekolah ini tapi karena ada salah satu dari mereka yang ingin menguasai jadi semuanya bubar. Kepala sekolah yang pada waktu itu Ibu Sri, tidak mengizinkan orang lain yang mengatur kebijakan sekolah. Pada waktu itu ada salah satu dari mereka yang membuat kebijakan bahwa ABK yang mau sekolah di 06 harus mendaftar ke dia dan membayar uang pendaftaran ke dia. Itu kan artinya ia ingin menguasai, hal ini dipandang sebagai menyalahi wewenang,*

*Ibu Kepala sekolah tidak membenarkan hal ini, akhirnya satu-satu dari mereka pindah tidak lagi di sini”.*

Adanya GPK yang membuat kebijakan sendiri tentang uang pendaftaran yang dimanfaatkan bukan untuk kepentingan sekolah menandakan adanya pengetahuan di balik kekuasaan. GPK merasa tahu banyak tentang ABK. Karena pengetahuan yang ia miliki maka ia menjadi berkuasa dalam membuat kebijakan uang pendaftaran. Namun kekuasaan GPK tersebut harus berhadapan dengan kekuasaan yang dimiliki oleh kepala sekolah sehingga salah satu harus ada yang mengalah atau terkalahkan. Wujud dari kekalahan tersebut adalah perginya GPK dari sekolah atau bisa pula kepergian GPK tersebut sebagai wujud perlawanan terhadap kepala sekolah dengan cara tidak mau bekerja lagi dan pergi dari sekolah.

Menurut pedoman penyelenggaraan inklusi, dinas pendidikan setempat seyogyanya membantu ketersediaan GPK di sekolah yang menyelenggarakan inklusi. Namun menurut pengakuan guru-guru yang ada, tidak pernah ada GPK dari dinas, sehingga mereka membuat kebijakan sendiri untuk keberadaan GPK tersebut;

*” Dari dulu sampai sekarang belum ada GPK dari Dinas yang ditugaskan di 06. Kami mencari GPK sendiri, kami dapat Bu Ina, tadinya Bu Ina itu Guru di Purba Adika. Bu Ina sudah ahli menangani anak autis karena di Purba Adika itu memang tempat sekolahnya anak-anak autis. Kami kelola sendiri untuk honorinya. Para orang tua anak Berkebutuhan di sini membayar perbulan sesuai dengan kemampuan ada yang 70 ribu ada yang 90 ribu sesuai kesepakatan. Tiap bulan ada pertemuan antara Kepala sekolah, GPK dan orang tua ABK untuk mengetahui perkembangan anak dan membicarakan segala sesuatu yang berkaitan dengan ABK”*

Pihak sekolah hanya mampu menyediakan satu orang GPK karena ketiadaan dana, padahal ABK yang ada di sekolah 20 anak, sehingga GPK hanya menangani 6 ABK yang benar-benar membutuhkan pendampingan berikut penuturan kepala sekolah;

*“Di sini Cuma ada satu GPK padahal ABK ada 20 anak; autis 3, diskalkulia 2, disleksia 1 dan sisanya 14 orang anak lambat belajar . Sebetulnya satu anak satu GPK, istilahnya shadow, tapi disini satu menangani 6 ABK, jadi yang lambat belajar tidak*

didampingi GPK diserahkan pada guru kelas saja. Satu GPK dalam satu minggu bergilir untuk 6 anak. Jelas itu tidak cukup, tapi mau bagaimana lagi”.

Hal ini dipertegas oleh GPK sebagaimana berikut ini;

“Kalau boleh mengatakan berat, ya berat tugas GPK di sini. GPK harusnya paling tidak ada dua untuk pembagian tugas di kelas kecil dan di kelas besar tapi masalahnya yaitu tentang pendanaanya yang tidak ada. Saat ini saja swadana dari pihak orang tua siswa, itu saja yang rutin bayar hanya dua orang tua saja”.

Di bawah ini adalah gambar data ABK di Lebak Bulus 06;

NO	NAMA SISWA	L/P	KLS	KET
1	Ande F Agucelani	L	IA	Autis
2	Dani Dewantoro	L	IA	Autis
3	revin	L	IV	Autis
4	Fajar Basuki	L	V	Autis
5	Rafif Dewantara	L	V	Autis
6	R. Aldo	L	II	Lamban belajar
7	Selvi Indah Andriani	P	II	Lamban belajar
8	Sandi	P	II	Lamban belajar
9	Riza	P	II	Lamban belajar
10	Wahyu Ramadhan	L	III	Lamban belajar
11	Wahyung Harindu	L	IV	Lamban belajar
12				Lamban belajar

Gambar 3.2 Data ABK di SD Lebak Bulus 06

Gambar 3.2 di sana tercantum nama Fajar Basuki di kelas 4, pada saat penelitian berlangsung Fajar sudah berada di kelas 5. Saya kemudian meminta data terakhir dari kepala sekolah. Beliau memberikan selembur kertas yang di dalamnya ada rincian jumlah ABK sebanyak 20 anak yang terdiri dari autis 3 anak, diskalkulia 2 anak, disleksia 1 anak dan sisanya 14 orang anak lambat belajar. Karena GPK hanya satu orang maka ia hanya menangani 6 anak saja sedangkan anak yang lambat belajar diserahkan kepada wali kelas masing-masing.

Keterbatasan jumlah GPK tentu saja berpengaruh pada proses pembelajaran dan penanganan ABK di sekolah. Pada gilirannya hal ini berpengaruh pada jumlah ABK yang diterima dalam setiap tahunnya.





Gambar 3.3 GPK sedang membantu ABK memahami gaya pegas

#### 3.3.4. Haya 1 dari 12 ABK

Ketika saya dan Ibu Suminah sedang duduk berbincang di kursi tamu di ruang guru, tiba-tiba ada seorang ibu yang membawa seorang anak laki-laki masuk ke ruang guru menyalami Ibu Suminah dan saya. *"Saya mau daftar anak saya untuk tahun ajaran baru nanti, ini jauh-jauh hari karena anak saya berkebutuhan khusus. Ini saya bawa surat keterangan dari psikoterapi. "Bu Ina sini sebentar"* panggil Bu Suminah *"Ibu bisa bicara dengan Bu Ina saja ya, karena Bu Ina adalah Guru Pembimbing untuk anak berkebutuhan, kebetulan kepala sekolahnya sedang kontrol kesehatan hari ini tidak masuk "*. Bu Ina dan tamu tersebut duduk di kursi tamu juga sehingga saya dapat mengikuti pembicaraan mereka. Tamu tadi menyerahkan surat keterangan kepada Bu Ina Bu Ina membaca *" Ya , ananda termasuk slow learner, mirip Dimas (ABK di kelas satu) ya Bu"* Bu Ina menoleh pada Bu Suminah, Bu suminah mengangguk. Bu Ina melanjutkan

*" Nanti kalau sudah dekat tahun ajaran baru Ibu ke sini saja lagi, sekarang kami tidak bisa memutuskan menerima atau tidak karena harus dibicarakan dengan kepala sekolah. Kami ingin memberikan yang terbaik dalam melayani tapi karena tenaga kami hanya satu orang GPK di sini ya jadi tidak mungkin kami terima semua karena kami takut tidak dapat memberikan yang terbaik. Tahun kemarin saja ada 12 orang ABK yang mendaftar ke sini namun kami hanya menerima satu saja. Jadi kami tidak memberi harapan pada Ibu kami juga tidak menolak saat ini, nanti datang saja lagi untuk ikut tes pada waktunya. Jadi kami sarankan Ibu juga tidak hanya ke sekolah sini untuk peninjauan tapi juga mencoba ke sekolah lain.*

*Bila sudah dekat waktunya Ibu bisa menelepon kami atau boleh juga Ibu meninggalkan nomor telepon yang bisa dihubungi”.*

Ibu tadi menyuruh anaknya sambil memberi kertas pada anaknya *”Nak tolong bilang sama papa minta nomor hp papa tulis di sini”*. Anak itu pergi ke luar menemui papanya. *”Bagus bisa memahami perintah, dalam keterangan ananda hanya slow learner aja, jadi ia memiliki kemampuan dua tahun dibawah usia sebenarnya. Itu harus diterapi terus Bu termasuk terapi wicaranya dimana Ibu terapinya?”* tanya Bu Ina. *”Di RS Fatmawati”* anak itu kembali sambil memberikan nomor hp pada ibunya.

*”Ini nomor hpnya Bu, kalau bisa saya juga minta nomor hp Ibu”* kata Si Ibu tersebut. *”Nomor sekolah saja Bu Ina”* sela Bu Suminah. Bu Ina menuliskan nomor telepon sekolah dan memberikannya pada tamu. *”Terima kasih ya Bu kalau begitu kami permisi pulang dulu”* Ibu itu bersalaman dengan Bu Ina, Bu Suminah dan saya. *”Salam dulu nak pada bu guru”* pinta ibunya. Si anak menyalami Bu Ina *”Itu dua lagi bu gurunya belum disalami kata ibunya. Ibunya mengira saya juga guru 06 karena saya memang memakai seragam warna biru dongker mirip dengan seragam guru. Si anak memandang Bu Suminah dan saya. Saya tersenyum, anak itu kemudian menyalami kami. Setelah tamu itu berpamitan saya melanjutkan pembicaraan dengan Bu Suminah*

*”Jadi tahun kemarin ada dua belas ABK yang daftar ke sini, banyak juga ya Bu?”. ”Ya begitulah, tapi kami cuma mampu menerima satu saja karena tenaganya yang tidak ada dan memang menurut peraturan hanya menerima satu atau dua saja<sup>1</sup>”.* *”Oh ada dimana itu Bu peraturannya bisa saya lihat?”. ”Sebentar ya dicari dulu, ada buku pedoman penyelenggaraan sekolah inklusi tapi lupa lagi naruhnya”.*

Saya kemudian menyarankan agar lain kali saja mencari pedomannya. Tiga hari kemudian saya menemui Bu Suminah lagi ternyata pedoman yang dimaksud tidak ada. Bu Suminah kemudian mengatakan;

*”Jadi soal berapa jumlah ABK yang diterima setiap tahun ajaran baru kita yang ambil kebijakan, karena tenaga kita tidak mencukupi jadi hanya menerima satu ABK saja dan itupun diseleksi diambil yang autis ringan saja kecuali untuk yang*

<sup>17</sup> Dalam draft Pedoman Direktorat PLB jumlah ABK yang bisa diterima pertahun bisa sampai lima anak, namun sebaiknya jenis ABK dibatasi dua jenis saja untuk memudahkan pengelolaan pembelajaran.

*pertama kali penerimaan karena kita ditunjuk jadi sekolah inklusi, tidak memakai tes yaitu Fajar, ia autis berat bisa lompat-lompat meja tuh saat pembelajaran berlangsung”.*

### 3.3.5. Tes dan Sosialisasi ABK Sebelum Masuk Kelas Satu

Karena SD Lebak Bulus 06 banyak peminatnya maka untuk penerimaan peserta didik yang baru dilakukan tes seleksi . Bagaimana seleksi untuk ABK? Berikut penuturan Ibu Suminah guru kelas satu;

*“ Untuk tes ABK sama saja dengan anak normal tapi lebih ringan misalnya kalo anak normal disuruh menulis angka 1-10, ABK menulis angka 1-5, anak normal ditanya nama lengkap orang tua, ABK ditanya nama kecil orang tua selain itu ada tebak gambar. Untuk anak ABK juga dilihat tingkah lakunya apakah bisa beradaptasi dengan lingkungan sekolah tidak? Yang Dimas kelas satu sekarang daftarnya kan satu semester sebelum tahun ajaran baru, jadi ia belajar bersosialisasi dulu ikut masuk di kelas satu yang ada, belajar pake seragam, pake seragam aja nangis tuh tadinya ga mau pake seragam, baru empat bulan berikutnya mau pake seragam, tadinya harus ditunggu mamahnya di dalam kelas, setelah masuk tiga hari di tahun ajaran baru, baru mamahnya bisa pergi ninggalin kelas”.*

Saat penelitian berlangsung saya melihat ada ABK yang sedang ikut program sosialisasi ini. Ia duduk di kelas satu bersama dengan Dimas ABK kelas satu.



Gambar 3.4 ABK sedang melakukan kegiatan sosialisasi

### 3.3.6. Kurikulum dan Penilaian untuk ABK

Kurikulum untuk anak ABK di sekolah ini sama dengan kurikulum yang digunakan oleh siswa yang lainnya. Kurikulum hanya satu dan semua siswa belajar sesuai dengan kurikulum tersebut. Hal ini dikemukakan oleh Guru Pendamping Khusus sebagai berikut;

*”Kalau benar-benar melakukan inklusi harusnya kurikulum berbeda antara anak reguler dengan ABK. Di sini kurikulum untuk ABK mengikuti kurikulum sekolah reguler, jadi kurikulumnya sama antara anak reguler dengan ABK. Harusnya tidak seperti itu. Itu semua karena kekurangan tenaga GPK. GPK cuma ada satu”.*

GPK hanya satu orang untuk mendampingi semua ABK yang ada di sekolah. Dalam menjalankan tugasnya ia membuat jadwal pendampingan untuk mata pelajaran tertentu saja seperti yang diutarakannya sebagaimana berikut ini;

*”Saya mendampingi ABK pada mata pelajaran IPA, Matematika dan Bahasa Indonesia saja. Itu bukan berarti mata pelajaran lain tidak penting, tapi saya harus memilih karena tidak ada GPK yang lain. Pemilihan mata pelajaran itu didasarkan karena mata pelajaran tersebut yang di UN kan. Untuk tahun ini pendampingan dilakukan lebih full di kelas enam karena ABKnya sangat parah sekali. Ia diskalkulia, lambat belajar dan tidak ada motivasi belajarnya jadi harus didampingi lebih banyak dibandingkan ABK yang lainnya. Saya sendiri yang menentukan dan meminta pada Bunda (kepala sekolah) untuk lebih full di kelas enam. ABK yang lain masih bisa ditangani guru kelas karena tidak separah ABK yang di kelas enam. Saya hanya sekali saja dalam satu minggu untuk ABK di kelas yang lain bahkan ada kelas yang jarang saya masuki dengan pertimbangan anak tersebut masih bisa mengikuti pelajaran seperti anak yang lainnya”.*

Di sini nampak bahwa dengan pengetahuan yang dimiliki GPK tentang kondisi ABK, maka ia menjadi memiliki kekuasaan untuk menentukan kebijakan apa yang harus dilakukannya dan pihak lain tinggal hanya menyetujui dan mengikutinya.

Dalam melakukan pendampingan pada ABK, GPK lebih menekankan pada pembuatan bank soal mata pelajaran IPA, Matematika dan Bahasa Indonesia. Soal-soal itu dibuat dalam bahasa yang lebih sederhana agar mudah dipahami oleh ABK. Kadang-kadang GPK memberikan bank soal ini pada saat siswa lain di

kelas yang sama sedang mengikuti mata pelajaran yang lain. Hal ini kemukakannya sebagai berikut;

*”Karena kesulitan waktu dan pembagian jadwal pendampingan, kadang-kadang saya tidak selalu pas memberikan pendampingan mata pelajaran IPA pada saat kelas sedang pelajaran IPA. Kadang saya masuk di kelas tertentu memberikan pendampingan IPA atau matematika saat kelas sedang pelajaran PKn”.*

Hal ini tidak menjadi masalah bagi yang lainnya karena sudah dianggap kewenangan dari GPK. Dalam melakukan pendampingan, GPK duduk disamping ABK. Sedangkan guru kelas mengajar seperti biasa. Jadi dalam kelas tersebut ada dua guru.

Penilaian (dengan angka) untuk ABK sepenuhnya diserahkan kepada guru kelas masing-masing sedangkan GPK hanya memberi penilaian yang berupa deskripsi kemampuan siswa secara umum dan penguasaan terhadap kompetensi yang harus dicapai dalam mata pelajaran IPA, Matematika dan Bahasa Indonesia. Perbedaan di akhir semester ketika siswa diberi raport adalah anak normal hanya mendapat satu raport dari guru kelas sedangkan ABK mendapat dua raport yakni dari guru kelas dan GPK.

Ujian Negara (UN) adalah salah satu ujian yang harus dilalui oleh setiap peserta didik termasuk Aldo ABK jenis diskalkulia yang ada di kelas enam. Berikut penuturan kepala sekolah ‘

*”Ya alhamdulillah semua lancar untuk Aldo sebenarnya kalau dia sendiri tanpa didampingi GPK paling dari 50 soal ia hanya bisa mengerjakan 8 soal. Tapi kemarin kita minta dispensasi karena kami punya anak khusus kami minta anak ini didampingi GPK untuk menyederhanakan soal dalam kalimat yang mudah dipahami anak. Jadi Bu Ina membacakan soal dengan kalimat yang sederhana yang dipahami Aldo. Ketika ujian Aldo dipisahkan di ruang sekretariat didampingi Bu Ina dan seorang pengawas ujian”. Pada hari pertama dari direktorat PLB datang ke sini dan menunggui seharian. Beliau bertanya apakah soalnya beda? Bunda menerangkan soal UN untuk anak normal dan ABK sama. Kata beliau harusnya beda, tapi ternyata pemerintah belum bisa memfasilitasi hal tersebut”.*

Dari pemaparan di atas dapat diketahui bahwa soal UN untuk anak normal dan ABK sama saja padahal pemerintah sudah seharusnya memberikan soal yang berbeda untuk ABK karena mereka adalah anak-anak *special needs*.

### 3.3.7. Ekstra Kurikuler

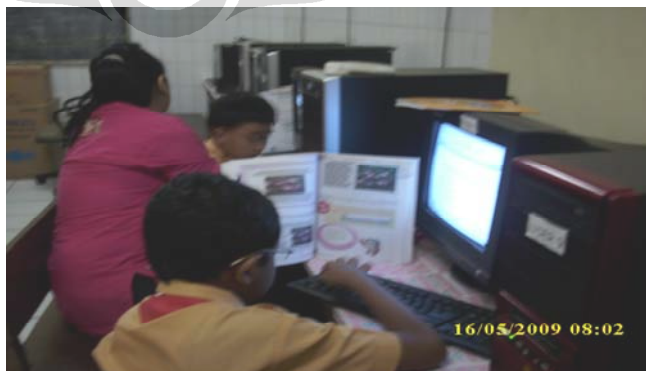
Ada beberapa pilihan ekstra kurikuler di SD Lebak Bulus 06 diantaranya Komputer, Marawis, Menari dan Pramuka. Kegiatan Ekskul ini dilaksanakan setiap hari sabtu. Seperti halnya peserta didik yang lain, ABK juga mempunyai hak untuk mengikuti ekstrakurikuler sesuai dengan bakat, hobby dan minatnya misalnya Fajar dan Kevin memilih komputer sedangkan Rafif mengikuti Marawis. Berikut adalah beberapa kegiatan ekstrakurikuler;



Gambar 3.5 Ekskul Marawis



Gambar 3.6 Ekskul Menari



Gambar 3.7 Ekskul Komputer





Gambar 3.8 Ekskul Pramuka

### 3.4. Dana Bea Siswa bagi ABK

Penyelenggaran sekolah inklusi ini masih jauh dari yang diharapkan. Namun ada hal yang patut disyukuri, dua tahun terakhir ini pemerintah memberikan bantuan bea siswa bagi ABK yang sekolah di sekolah reguler. Hal ini dikemukakan oleh Bu Ina ini sebagai berikut;

*"Ada bantuan dana dari direktorat PLB untuk 20 anak sebesar 11 juta. Kita sudah mendapat dua kali dengan tahun ini. Tahun pertama ketika masih Bu Sri kepala sekolahnya, dibagikan pada orang tua anak masing-masing dua ratus ribu sisany beli alat-alat media inklusi. Dana yang diberikan pada orang tua ternyata ada yang tidak sesuai aplikasinya malah digunakan oleh orang tua untuk kebutuhan dapur, anaknya masih saja tidak pakai baju seragam yang bagus malah tidak pakai kaos dalam. Makanya untuk tahun ini kita tidak bagikan dalam bentuk uang tapi dalam bentuk barang. Kita belikan alat peraga, media belajar, seragam dan buku. Ada juga lho orang tua yang datang minta dalam bentuk uang, tapi kami tetap dalam keputusan tidak diberikan dalam bentuk uang. Dilihat kebutuhannya, apa buku, seragam atau apa".*

Bantuan dana bea siswa untuk ABK ini juga dikemukakan oleh kepala sekolah berikut ini;

*"Alhamdulillah selama saya di sini sudah ada bantuan dana satu kali dari Dinas Provinsi setiap ABK 600 ribu pertahun. Kami tidak bagikan dalam tunai karena saya juga dengar bisik-bisik dan keluhan dari guru katanya tidak digunakan semestinya. Malah digunakan untuk beli beras. Jadi kemudian kami lihat bakat dan hobynya apa ABK ini, kami salurkan ke situ, ya ada yang pianika, suling, buku, dan lain-lain termasuk seragam. Misalnya Kevin hobynya membaca buku cerita maka kita belikan buku-buku yang mengandung character building"*



Gambar 3.9 Kevin gemar membaca

### 3.5. Kesulitan ABK Masuk Sekolah

Pada umumnya orang tua siswa ingin menyekolahkan anaknya di SD yang tidak terlalu jauh dari lokasi tempat tinggalnya. Namun bagi orang tua yang memiliki ABK, hal ini menjadi sebuah kesulitan tersendiri. Kondisi ini dikemukakan oleh Ayah Fajar sebagai berikut;

*"Kronologinya begini, saya ditanya oleh guru TK Bakti Ibu dulu tempat Fajar TK mau ke mana anak saya meneruskan sekolahnya? Saya terus terang tidak mau anak saya disekolahkan ke SLB karena kalau ke SLB anak saya mpengetahuannya makin sempit dan dalam bersosialisasi juga sempit. Saya pertama daftar ke sekolah Lebak Bulus 04 yang dekat lokasinya dari tempat tinggal. Saya masih menyembunyikan keadaan Fajar yang sebenarnya. Anak saya ikut tes seleksi seperti anak pada umunya. Hasilnya cukup baik, namun saat diwawancara anak saya tidak bisa tenang tidak bisa diam. Mungkin guru berpikir anak ini nakal sekali. Saat pengumuman penerimaan, secara hasil akademik anak saya diterima tapi nama anak saya dibuletin. Saya kemudian bertanya mengapa di buletin. Pihak sekolah meragukan apakah mereka bersedia menerima anak ini atau tidak. Akhirnya saya terus terang dengan menunjukkan surat keterangan dari klinik terapi, dokter yang menngani dan dari guru TK yang menerangkan kondisi anak saya yang autis namun sudah bisa belajar untuk berinteraksi. Ternyata 04 tidak bisa menerima anak saya dengan alasan 'Kita Belum Terbiasa menangani anak yang seperti ini". Saya bilang yang dicoba agar terbiasa. Saya juga menjelaskan nanti kami akan menempatkan guru pendamping di sini untuk membantu proses belajarnya dan pihak sekolah tidak perlu mengeluarkan uang. Kepala sekolahnya memanggil guru kelas satu ditanya apa sanggup mengajar anak seperti ini. Guru dan kepala sekolah itu*

*berdiskusi akhirnya mereka mengatakan 'Kami tidak bisa menerima anak ini karena belum punya SK'. Ya sudah akhirnya*



*saya dan Pak Ignatius dan Tim menghadap Kasi Dikdas Cilandak waktu itu Drs Suyatno agar anak saya dapat bersekolah. Pak Suyatno menelepon 02 sudah penuh, 03 sudah penuh juga Purba Adhika bisa menerima tapi biayanya mahal, saya tidak sanggup, saya kan hanya tukang koran. Akhirnya Pak Suyatno mendatangi 06 agar dapat menerima anak saya. Akhirnya ya Fajar bisa bersekolah di sini saya sangat bersyukur sekali”.*

Dari paparan di atas dapat diketahui kekhawatiran orang tua tentang kondisi anaknya yang autis tidak dapat diterima di sekolah umum sehingga pada awalnya ayah Fajar menyembunyikan kondisi anaknya yang sebenarnya, namun pada akhirnya kekhawatiran itu terbukti saat sekolah mengetahui kondisi Fajar yang sebenarnya sekolah tidak mau menerima Fajar untuk bersekolah di SD tersebut. Kegigihan ayah Fajar dibantu oleh Tim Peneliti dengan menghadap Kasi Pendidikan kecamatan akhirnya membuahkan hasil. Fajar dapat bersekolah di sekolah umum.

Kesulitan Fajar untuk bersekolah di sekolah umum juga dialami oleh Kevin seperti dikemukakan oleh Ayah Kevin berikut ini;



Gambar 3.10 Ayah Kevin

*”Awalnya saya ingin anak saya sekolah di SD 02 atau 03 yang dekat dengan rumah, tapi semua tidak bisa menerima anak saya, 05 juga tidak bisa. Mungkin karena mereka melihat anak saya tidak bisa diam, mereka tidak mengetes anak saya baca tulis, padahal anak saya sudah bisa baca tulis. Tadinya saya tidak tahu kalau sekolah 06 ini inklusi bisa menerima anak berkebutuhan. Ada usul dari guru di 03 katanya coba ke SD 06 karena di sana sekolah inklusi. Saya terus menghubungi teman saya Pak Karim yang kebetulan guru olahraga di 06. Pak Karim bilang kenapa tidak dari dulu, saya malu juga dibilang begitu. Ya akhirnya anak saya sekolah di sini”.*

Kesulitan ABK untuk masuk sekolah bukan hanya karena sekolah reguler yang tidak bersedia menerima namun juga karena sekolah swasta yang menerima ABK biayanya sangat mahal. Hal ini dituturkan oleh Ibu Dimas;

*“Saya kan tinggal di Depok, di Depok belum ada sekolah umum yang inklusi, ada juga swasta tapi bayarannya mahal, biaya perbulannya 1,8 juta, biaya masuk 22 juta. Terus biaya registrasi pertahun 12 juta. Dari mana saya bayar? Kalau hanya sebulan, dua bulan saya kuat bayaran, tapi ini kan untuk enam tahun. Jadi saya bingung dimana anak saya bisa sekolah? Saya tanya sama orang di tempat terapi saya di Dwi Gantari. Ia menyarankan knapa tidak sekolah di tempat sekolahnya Fajar saja. Saya kemudian menghubungi Bapaknya Fajar yang kebetulan tempat terapi Fajar sama di Dwi Gantari. Bapaknya Fajarlah yang berjuang anak saya bisa diterima di sini. Sebenarnya ada 9 orang yang daftar ke sini tahun 2008/2009 tapi hanya Dimas saja yang diterima, sekarang anak saya kelas satu”.*



Gambar 3.11 Ibunya Fajar dengan Ibunya Dimas

Dari paparan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa relasi teman dapat membantu memecahkan masalah kesulitan mencari sekolah untuk ABK. Pada kasus Kevin, ayah Kevin meminta bantuan pada temannya yakni Pak Karim yang kebetulan guru. Guru di sekolah yang bersangkutan dapat memiliki kekuasaan dalam memberikan masukan ABK mana yang bisa diterima. Sedangkan dalam kasus Dimas, Ibu Dimas meminta bantuan Bapak Fajar yang sudah dikenal pihak sekolah karena Fajar adalah ABK pertama yang diterima di sekolah ini. Tentu saja sedikit banyak relasi-relasi yang baik ini memberikan pengaruh terhadap kekuasaan penentuan penerimaan ABK.

### 3.6. Pandangan Siswa yang Lain terhadap ABK



Gambar 3.12 Fajar (ABK kelas 5) dan Kevin (ABK kelas 3)

Waktu itu saya sedang mengikuti proses pembelajaran di kelas lima. Kebetulan kepala sekolah memberikan pelajaran Bahasa Indonesia. Tiba-tiba Fajar berdiri di atas kursi sambil memegang dan menggoyangkan lemari yang berada di sampingnya, ia berbicara sendiri, *"Buka lemarnya-buka lemarnya!"*. Kepala sekolah mendekati saya dan berkata *"Anak ini kalo diperhatikan tingkah polahnya malah bertambah parah, jadi kalo sudah begini saya harus panggil guru GPK"* sambil keluar mencari guru GPK. Fajar menghampiri temennya yang sedang menulis *"Apa tuh, apa tuh?"* sambil mencolek-colek temannya dan mengambil tempat pensil temannya. Bu Ina guru GPK datang *"Ah Bu Ina melulu!"* Kalimat itu terlontar dari Fajar saat melihat kedatangan Bu Ina. *"Eh tidak sopan"* jawab Bu Ina, Bu Ina membimbing Fajar keluar kelas lima dan masuk ke ruang kelas enam sambil membawa buku milik Fajar. Bu Ina sedang melakukan pendampingan di kelas enam.

Pada jam istirahat saya bertanya pada siswa kelas lima tentang pandangan mereka terhadap Fajar *"Orangnya reseh"* Seli menjelaskan. *"Iya nakal"* timpal Okta. Seli memberi penjelasan lanjutan *"Dulu kelas satu sampai kelas empat duduknya kadang-kadang sama aku, bergilir gitu beberapa teman. Tapi di kelas lima ia duduknya sendiri di dekat Ibu Guru"*. Okta menambahkan *"Kalau jam istirahat Fajar suka langsung pergi ke ibunya, kan ibunya suka nunggu"*. Ketika saya tanya Hardi dan Aldi tentang Fajar, Aldi dan Hardi menjawab serempak *"Agak nakal, suka ganggu"*. Aldi menambahkan *"Kertas ulangan saya suka diambil, kan saya jadi gemes"*. *"Apakah kalian senang punya teman seperti*

*Fajar?”tanya saya. “Ya senang, sama saja dengan yang lain, tapi agak nakal”Jawab Hardi, Aldi mengangguk menyetujui Hardi.*

Meskipun siswa yang lain dapat menerima keberadaan ABK, namun orang tua ABK tetap saja menunggui anak-anak mereka sehingga dalam bergaul saat jam istirahat ABK memilih bersama orang tuanya. Hal ini dapat mengurangi kecepatan ABK untuk menghilangkan hambatan bersosialisasi dengan teman sebayanya.

### **3.7. Pandangan Masyarakat dan Orang Tua Siswa yang Lain**

Keberadaan ABK di sekolah tentu menuntut tidak hanya penerimaan dari pihak sekolah yakni kepala sekolah dan guru juga siswa yang lainnya namun juga dari orang tua siswa yang lainnya.

Berikut pemaparan Ayah Kevin tentang tanggapan orang tua siswa yang lain dan masyarakat di sekitarnya;

*”Saya tahu sebenarnya ada orang tua siswa lain yang tidak suka ada ABK di sekolah ini. Ya wajarlah ada yang suka dan tidak suka itu wajar, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena ini sudah keputusan pemerintah. Yang berat bagi mental dan pikiran saya adalah anggapan masyarakat sekitar tempat tinggal saya. Ada yang menganggap anak saya gila, karena ga bisa diam. Tadinya saya juga tidak bisa menerima anak saya ini, mengapa saya dikasih anak seperti ini, saya jadi mudah marah dan tersinggung. Tapi anak saya tetap saya terapi ke Fatmawati. Lama-lama saya juga bisa menerima keadaan anak saya. Anak saya itu tidak apa-apa koq, ia pintar buktinya di kelasnya saja ia ranking lima. Sebenarnya pada waktu umur satu tahun ia normal seperi anak yang lain udah bisa panggil mamanya, bapaknya minta minum, tapi menjelang umur dua tahun ia jadi tidak bicara, dipanggil tidak mau nengok. Saya dari situ mulai bawa anak saya ke Fatmawati. Akhirnya saya yakin Kevin bisa masuk di sekolah umum, saya tidak mau masukin Kevin ke SLB. Kalau harus ke SLB mending saya didik sendiri di rumah. Kerjaan saya kan pembina ekskul sepak bola di beberapa sekolah semua kerjanya sore hari jadi pagi-pagi bisa nunggu anak saya. Mungkin yang di Atas Sana sudah mengatur begitu, Kamu pagi-pagi urusin anak, nanti sore cari makan. Itu sangat saya syukuri”*

Pihak sekolah membuat program pengenalan sekolah inklusi pada setiap awal tahun pada orang tua siswa sehingga diharapkan semua orang tua siswa dapat menerima keberadaan ABK di sekolah ini. Berikut penuturan Ibu Dimas;

*”Pertama kali masuk orang tua semua dikumpulkan. Bu Suminah, guru yang ahli inklusi di sini menjelaskan pada orang tua bahwa sekolah ini inklusi program pemerintah jadi ada anak berkebutuhan khusus, nah pada tahun ini jatuh pada anak saya Dimas, kemudian saya diminta memperkenalkan diri dan memberikan kata-kata. Saya mengatakan pada semua orang tua murid baru bahwa autis itu bukan penyakit menular yang harus ditakuti, jadi jangan khawatir terhadap keberadaan anak saya. Saya meminta semua orang tua dapat bekerja sama dalam hal ini karena saya tidak meminta pada Allah bahwa anak saya autis, Dimas juga tidak minta dilahirkan untuk menjadi autis, syukurlah semua orang tua bisa menerima keberadaan anak saya di sini”.*

Program pengenalan sekolah inklusi ini menjadi efektif dilakukan karena orang tua siswa yang lain tidak dapat berbuat apa-apa untuk menolak keberadaan ABK di sekolah ini. Karena dalam kegiatan tersebut dijelaskan bahwa sekolah inklusi ini adalah program pemerintah dan sekolah ini telah ditunjuk menjadi salah satu sekolah inklusi. Kata-kata “Program Pemerintah” merupakan wacana efektif yang dimaknai oleh Ayah Kevin dan orang tua siswa yang lain sebagai keputusan pemerintah yang tidak bisa tidak harus diterima dan dijalankan. Program pengenalan sekolah inklusi yang menjadi agenda tahunan sekolah adalah strategi dan mekanisme kuasa yang dijalankan oleh pihak sekolah agar kelangsungan sekolah inklusi dapat berkelanjutan.